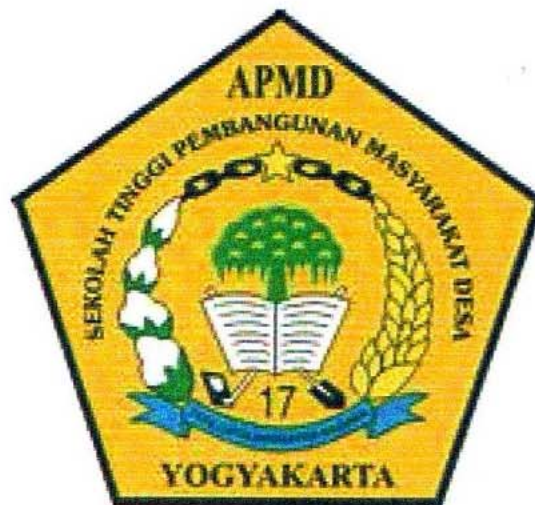


**PENGELOLAAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA SRIGADING,
KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL, D. I. YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Edison Ledi Bulang

N I M : 13520043

Prodi : Ilmu Pemerintahan

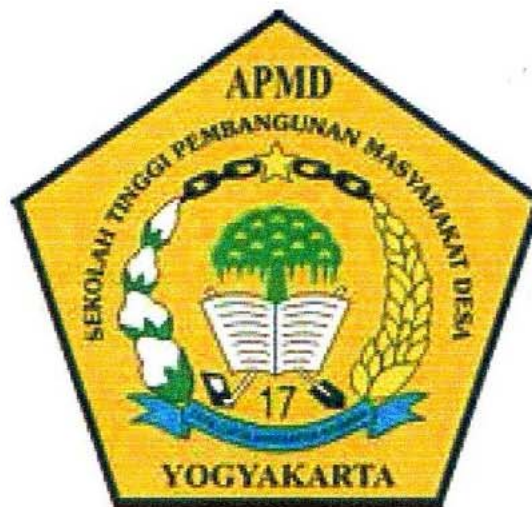
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

PENGELOLAAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA(PADes) DI DESA SRIGADING, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL, D. I. YOGYAKARTA

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan mencapai Derajat Sarjana pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Oleh :

Nama : Edison Ledi Bulang
N I M : 13520043
Prodi : Ilmu Pemerintahan

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 12 April 2017
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

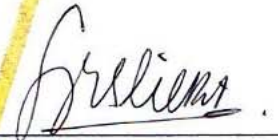
1. **Ir. Muhammad Barori, M.Si**
Ketua/Penguji/Pembimbing




2. **Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si**
Penguji Samping I



3. **RR Leslie Retno Angeningsih, Ph.D**
Penguji Samping II



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Gregorius Sahdan, S.IP, M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2017

MOTTO

“Jangan pernah takut salah untuk mencoba, jika kita salah membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna dihadapan Tuhan, jika kita benar membuktikan bahwa Tuhan memberikan akal budi bagi kita sebagai manusia”

“Semangattlah dalam mengerjakan sesuatu walaupun hasilnya tidak menjanjikan untuk sukses”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan buat:

1. Bapak Pati Bulang dan Ibu Bauru Peda, Roky Lele, terimakasih untuk semua yang saya terima dari jerih payah maupun Doa serta motivasi Bapak dan Ibu. Kalian berhasil mengubah lumpur menjadi emas.
2. Kakak Maria Bulang, Kakak Leman, Kakak Ros, Kaka Lili, Kaka Maris, Kaka Ubbu. Terimakasih atas dukungan Doa, motivasi dan materi.
3. Adek Melki, Ade Marthen, Nona Ngara.
4. Tamo Ole Ngara” Marciano Bulang” dan Tamo Ama Weda”Juneldi C. Dima Bulang.
5. Kaka Beja, Kaka Eny, Kaka Domi, Kaka Ama Pote Wali dan Bapanya Ade Bulu.
6. Keponaan tercinta: Ayu, Jeni, Alavaro, Adi Bulu.
7. Tamo Ama” Paul Bulang”.
8. Almamater tercinta STPMD”APMD” Yogyakarta.
9. LJF “Hawuna Ate”
10. LJF FC.
11. Untuk kamu wanita yang selalu bilang ceroboh, jiwa sosial terlalu tinggi sehingga kamu lupa dengan dirimu sendiri.
12. Saudara Pengurus KOMAP periode 2015-2016.
13. Ade Fitri, Ade Fina, Intan Pessek, Sela Kareko, Belta, Tomas, Frid, Ady Jo, Ika, Ina Wulan.
14. Crisnawati, Sani, Noker, Ucan, Khen, Aden, Daniel, Gregor, Agus.
15. Ina Yarti dan ade Fei.
16. Bapak dan Ibu Kost.
17. Anak kost Fleksibel dan Kost BPJS.
18. Untuk itu terimakasih kepada semua kawan-kawan, saudara/i, kerabat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan rahmat dan anugrah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada jenjang strata satu (S1), judul dalam penelitian ini adalah **PENGELOLAAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA SRIGADING, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak. Maka itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Habib Muhsim, M.Si, selaku ketua Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat Desa”APMD”Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan Selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Ir. Muhammad Barori, M.Si, selaku dosen pembimbing yang setia dan sabar dalam mengarahkan penulisan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pemerintah Desa Srigading yang menerima saya untuk melakukan penelitian serta yang sudah membantu menyediakan informasi sesuai dengan penelitian.
5. Bapak Pati Bulang dan Ibu Bauru Peda, Roky Lele yang mendukung saya baik materi maupun semangat dan Doa.
6. Kakak Meryy, Kakak Leman, Kakak Ros, Kakak Lili, Kakak Maris, Kakak Ubbu. Adek Melki, Marthen, Marciano, Marsel, Alfa, Ayu, jeni.
7. Kakak Beja dan Kaka Eny, Bapa Alva, Bapak Ayu yang sudah membantu dalam doa dan materi.
8. Sepupu Filmon Lere yang menjadi saksi hidup bahwa dalam diamku aku sedang berjuang.
9. Ade Shinta dan Nike.
10. Ina Maria Trioktaviani, Terimakasih atas motivasi maupun Doanya.

11. Laboya Jogja Family (LJF) yang sudah berbagi cerita tentang arti sebuah persaudaraan.
12. Kawan-kawan Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (KOMAP), yang luar biasa, yang sudah mendukung saya selama masa kepengurusan, Sekret KOMAP menjadi saksi bisu bahwa kita pernah berjuang, tertawa, dan menangis bersama.
13. Gerus yang selalu berikan motivasi dan Doa.
14. Kawan-kawan KKN om Hans dan Yani.
15. Kakak Marco, Kakak Rendi, dan Zona Barat satu, terimakasih buat kalian atas motivasi dan Doanya.
16. Seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapat karunia dan balasan dari Tuhan Yesus Kristus.

Yogyakarta 20 April 2017

Penyusun,

Edison Ledi Bulang
13520043

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
INTISARI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konsep	8
1. Pengelolaan	8
2. Potensi Desa	18
3. Aset Desa.....	20
4. Pendapatan Asli Desa (PADes)	27
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	29
G. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Unit analisis dan penentuan informan.....	30
3. Teknik Pengumpulan Data	31
4. Teknik Analisis Data.....	32
BAB II PROFIL DESA SRIGADING	35
1. Sejarah	35
2. Kondisi Geografis.....	35
3. Jumlah Penduduk di Desa Srigading	36

4. Banyaknya pasar dan Minimarket di Desa Srigading	37
5. Luas Lahan Pertanian yang terdapat di Desa Srigading	37
6. Lembaga Keuangan di Desa Srigading.....	38
7. Prasarana dan Sarana Desa	38
8. Pemerintahan.....	39
9. Pemerintahan Desa	40
10. Pembagian wilayah pedukuhan	40
11. Pariwisata	41
BAB III ANALISIS PENGELOLAAN POTENSI DESA UNTUK	
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	42
A. Deskripsi Informan	42
B. Analisis Pengelolaan Potensi Desa.....	45
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PADes Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016	5
Tabel 2.1	Jumlah penduduk dan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya yang terdapat di Desa Srigading, pada tahun 2016	36
Tabel 2.2	37
Tabel 2.3	Tabel Lembaga keuangan di Desa Srigading.....	38
Tabel 2.4	Data Prasarana Perhubungan Desa Srigading Tahun 2016.....	39
Tabel 3.1	Distribusi Informan menurut umur.....	43
Tabel 3.2	Distribusi informan menurut jenis kelamin	43
Tabel 3.3	Tingkat Pendidikan Informan	44
Tabel 3.4	Tingkat Kedudukan	45

INTISARI

Pada saat ini desa menjadi ujung tombak Negara, sebab sebelum adanya Negara Desa terlebih dahulu ada, Desa pada saat ini berhasil mengalihkan perhatian bagi banyak orang khususnya pemerintah. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, termotivasi baik itu Pemerintah Desa maupun masyarakat atau lembaga-lembaga yang terdapat di desa, pada saat ini desa dipercaya melalui Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk menggali atau mengelola potensi-potensi yang terdapat dalam desa tersebut, baik itu potensi sumber daya manusia maupun potensi alam, menggali atau mengelola potensi yang terdapat di setiap desa dengan didukung dengan finansial (modal) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta tentunya didukung dengan sumber daya manusia agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik dengan pemerintah Desa Srigading sedang mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Srigading. Rumusan Masalah Skripsi ini adalah Bagaimana pemerintah desa mengelola potensi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PADes).

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan dan menuliskan peristiwa yang ada berdasarkan fakta-fakta yang di amati di lapangan maupun berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dengan menggunakan metode yang ada. Obyek penelitian ini adalah Pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sumber data yang digunakan sebagai sumber data adalah Pemerintah Desa berjumlah 4 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 2 orang, Lembaga Kswadaya masyarakat berjumlah 2 Orang, masyarakat berjumlah 2 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini bahwa potensi-potensi yang terdapat di desa Srigading adalah potensi lahan pertanian, potensi irigasi, potensi budaya, potensi kuliner bebek dan potensi wisata pantai karena Desa Srigading bagian selatan langsung perbatasan dengan pantai selatan yakni pantai samas, serta potensi kerajinan tangan. Pengelolaan potensi-potensi di desa srigading, pemerintah merencanakan pemanfaatan potensi, seperti potensi lahan pertanian yang didukung dengan irigasi untuk mengolah lahan pertanian yang ada, Pemerintah desa Srigading juga mengelompokkan potensi yang ada dan membuat lembaga baik bergerak di sosial maupun yang bergerak untuk mengejar profit agar mengelola potensi yang ada. Pemerintah Desa Srigading juga melaksanakan apa yang sudah direncanakan seperti lembaga yang bergerak di bidang profit yakni mengelola Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) seperti wisata kuliner Pengklik dan lahan pertanian sebagai tanah kas Desa Srigading. Setelah pelaksanaan pemerintah desa Srigading dan BPD juga mengawasi Pemerintah Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa dijadikan sebagai ujung tombak Negara dalam menyukseskan pembangunan, sesuai dengan kebijakan Nasional atau Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla yakni membangun Indonesia dari daerah pinggiran, karena beberapa permasalahan terdapat di desa, seperti permasalahan; kemiskinan, pengangguran, angka putus sekolah, beberapa permasalahan tersebut ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi setiap desa di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau untuk hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 3 pengaturan desa berasaskan : rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Dengan hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan, desa mampu secara mandiri mensejahterakan

masyarakatnya tanpa ketergantungan pada pemerintah Daerah, Pemerintah Desa harus berupaya untuk memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengelola potensi yang terdapat dalam desa tersebut. Potensi tersebut bisa dilihat dari Sumber Daya Manusia itu sendiri maupun dari sumber daya alamnya. Kedua sumber daya harus mampu dimaksimalkan untuk mengelola potensi yang ada di desa. Jika hanya potensi sumber daya alam yang terdapat dalam desa tanpa diimbangi potensi sumber daya manusianya maka tentunya menjadi suatu masalah. Maka dari itu pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia (Notoatmodjo (1992: 5) harus dikembangkan sebagai bentuk pemberdayaan dalam mewujudkan pembangunan desa. Untuk itu perlu pengelolaan potensi-potensi yang ada di desa, pengelolaan potensi desa dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Desa, Dana tersebut menjadi modal untuk dana pembangunan atau kesejahteraan masyarakat bagi desa tersebut.

Pendapatan Asli Desa (PADes) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah. Ini merupakan sumber pendapatan desa untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasilguna sehingga desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan (Pendapatan). Oleh karenanya

optimalisasi potensi Pendapatan Asli Desa menjadi hal yang sangat urgen. Jika PADes bisa dikembangkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian Desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di Desa.

Berkaitan dengan Sumber Pendapatan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa : Pendapatan Asli Desa terdiri dari atas hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa (a); Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(b); Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota (c); Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota (d); Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten kota (e), Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (f); serta Lain-lain pendapatan Desa yang sah (g).

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, alokasi APBN, Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten, serta hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Berdasarkan hal tersebut dapat di ketahui bahwa potensi dari sumber pendapatan desa banyak.

Dalam pengelolaan pengembangan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal

77, bahwa pengelolaan kekayaan hak milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi (1), pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa (2), pengelolaan kekayaan milik desa dibahas oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam peraturan pemerintah (3).

Pendapatan Desa merupakan penerimaan uang sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa Pasal 9 ayat (1) adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sumber pendapatan Desa yang hasilnya maksimal dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan fisik jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya maupun pembangunan non fisik.

Potensi desa yang terdapat di Desa Srigading yakni sebagian wilayahnya adalah wilayah pertanian dan terdapat tanah kas desa, pasar desa, kuliner, pantai, pengolahan sampah, jika potensi tersebut di dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi Di Desa Srigading sebagai berikut :

Tabel 1.1

PADes Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul

Tahun 2015-2016

No	Tahun	PADes
1.	2015	Rp. 350.000.000
2.	2016	Rp.380.000.000

Sumber : Data Dokumentasi Desa Srigading

Menurut data Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Srigading selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan, ini membuktikan bahwa pengelolaan potensi sudah ada. Dan aset Desa adalah modal Utama yang bisa mendukung kegiatan pembangunan dan kesejahteraan bagi anggota warga masyarakat, potensi yang ada Desa harus di kembangkan agar meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Di perkirakan pada tahun 2017 ini Pendapatan Asli Desa Srigading akan mengalami peningkatan sekitar Rp.476.687.680.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, di Desa Srigading. Potensi- potensi yang terdapat di Desa Srigading yakni potensi alam yang terdiri dari Pantai Samas sebagai tempat berwisata yang dampaknya akan meningkatkan Pendapatan Asli desa (PADes) dan juga menambah penghasilan bagi masyarakat, potensi pertanian yang sebagian wilayah Srigading adalah wilayah pertanian, potensi budaya, potensi kreatif kerajinan, potensi kuliner (Penglik).

Dalam pengelolaan potensi-potensi yang terdapat di Desa Srigading, ada beberapa yang sudah dikelola yakni lahan pertanian, pantai Samas, kuliner Pengklik, pengelolaan sampah, pengelolaan tersebut sudah menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Dalam perencanaan pemanfaatan, pemerintah desa merencanakan pemanfaatan potensi-potensi yang terdapat di Desa Srigading, Dalam pelaksanaannya pemerintah desa membuat atau mendirikan lembaga baik yang bergerak di bidang sosial maupun dibidang profit untuk mengelola potensi yang ada, seperti lembaga Kelompok Sadar Wisata(POKDARWIS), kuliner Pengklik, kelompok tani. Pengelompokkan (pengorganisasian) potensi-potensi yang terdapat di Desa Srigading, serta dalam pengawasan terhadap para pelaksana potensi yang ada atau sudah dimanfaatkan, pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah: Bagaimana Pemerintah Desa mengelola potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai dan apa yang menjadi tujuan penelitian harus mempunyai arah yang jelas. Tujuan penelitian yang merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang di peroleh setelah penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengelolaan potensi desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tentang pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DIY, adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Srigading.
2. Mendapatkan gambaran empirik tentang kondisi potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Srigading.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa, fasilitator, narasumber serta berbagai pihak yang berkepentingan, yang terkait dalam proses pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

E. Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti dibimbing oleh berbagai konsep yang dipandang berkaitan dengan topik penelitian, konsep tersebut maka sebagai alat analisis atas data yang diperoleh.

1. Pengelolaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI: 2010), pengelolaan didefinisikan sebagai berikut: proses, cara, pembuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Pengelolaan (Manajemen) menurut Drs. Malayu S.P Hasibuan (2007) adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia maupun sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan.

Pengolaan (Manajemen) menurut George R. Terry (2014) adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang ditentukan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Menurut Prajudi, pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Pengelolaan (Manajemen) menurut Andrew F. Sikula dalam bukunya Drs.Malayu S.P Hasibuan(2007) merupakan aktivitas aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan, yang dilakukan oleh setiap organisasi, dengan tujuan untuk mengkoordinasikan, berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Pengertian pengelolaan menurut Moekijat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
(<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>)

Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
(<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>)

Pengelolaan (Manajemen) menurut Mary Parker Follet (1997) dalam bukunya Ernie Tisnawati Sule & Kurmiawan Saefullah (2012) manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain.

Pengelolaan adalah suatu proses yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemanfaatan, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan bidang keuangan/dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya (Depdikbud, 1995/1996 : 1-2). (<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>)

a. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan- kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan.
- 9) Mengadakan penilaian

10) Mengadakan review secara berkala.

11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang

b. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Sedangkan menurut John D. Millet dalam Burhanuddin (1994:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning* *Organizing* *Actuating* *Controlling*.

Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* *Organizing* *Motivating* *Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja

actuating diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama.

Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Bagi suatu organisasi, pengelolaan menyangkut keseluruhan urusan organisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu seluruh komponen atau unsur yang ada didalamnya, yaitu para pengelola dengan berbagai aktivitasnya harus memfokuskan pada perencanaan yang menyangkut penyusunan staff, penetapan program latihan jabatan dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan jangka pendek dan jangka panjang dari suatu organisasi tersebut.

c. Pengelolan yang Baik

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang

merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut George R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

- 1) Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu

tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.

- 4) Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30) adalah :

- 1) Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- 2) Memusatkan perhatian kepada sasaran
- 3) Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis
- 4) Memudahkan pengawasan

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 43) adalah :

- 1) Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat
- 2) Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- 3) Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.

- 4) Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- 5) Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006 : 364) adalah :

- 1) Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- 2) Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- 3) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- 4) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- 5) Membuat organisasi berkembang secara dinamis

Tujuan pengawasan menurut Sukarno (1982 : 165) sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- 2) Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah diperintahkan.
- 3) Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam pekerjaan atau bekerja.
- 4) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektif atau efisien.
- 5) Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan.

Fungsi-fungsi pengelolaan (manajemen) menurut George R. Terry, (buku prinsip-prinsip manajemen: 2014) sebagai berikut:

- 1) *Planning* ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan *planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola hidup dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
- 2) *Organizing* mencakup : (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang diutuhkan untuk mencapai tujuan kedalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokkan tersebut dan, (c) menetapkan wewenang diantara kelompok atau unit-unit organisasi pengorganisasian berhubungan erat dengan manusia, sehingga pencaharian dan penugasannya kedalam unit-unit organisasi sebagai bagian dari unsur organizing.
- 3) *Actuating* mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.
- 4) *Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Ada berbagai cara untuk mengadakan perbaikan termasuk merubah rencana

dan bahkan tujuannya, mengatur kembali tugas-tugas atau merubah wewenang; tetapi seluruh perubahan tersebut dilakukan melalui manusianya. Orang yang bertanggungjawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan harus dicari dan mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap hal-hal yang sudah atau akan dilaksanakan.

Dari berbagai definisi tentang pengelolaan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan. Pengelolaan merupakan pembagian tugas dan fungsi yang jelas, mulai dari proses perencanaan sampai pada controlling atau evaluasi yang sudah dikerjakan agar dapat mencapai tujuan.

2. Potensi Desa

Potensi desa adalah segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yg terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan untk kelangsungan dan perkembangan desa tersebut. atau Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. (<https://inirumahpintar.blogspot.com/2016/10/pengertian-dan-contoh-potensi-desa.html>)

Potensi desa terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi non fisik.

a. Potensi fisik

Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa seperti tanah, air, lahan pertanian, hewan ternak, cuaca iklim dan lainnya. Lokasi desa di Indonesia berbeda-beda karena kenampakan fisik dan morfologi Indonesia beranekaragam mulai dari dataran rendah, pantai, bukit sampai pegunungan. Perbedaan kenampakan fisik tersebut akan berpengaruh terhadap jenis potensi desa yang bersangkutan. Misalnya di desa yang berlokasi di wilayah pantai maka dapat diketahui kondisi cuaca dan iklim di daerah tersebut adalah panas. Sedangkan sumber daya alam yang ada di pantai antara lain tambak, kelapa, ikan, terumbu karang dan lainnya. Beda halnya dengan di wilayah dataran tinggi yang berhawa sejuk maka potensi fisik desanya akan berupa daerah pertanian yang subur, sayuran, dan hewan ternak.

b. Potensi non fisik

Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri.

(<https://geograph88.blogspot.co.id/2014/11/potensi-fisik-dan-non-fisik-desa.html>)

3. Aset Desa

Aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset Desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang Desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

Agar lebih jelas tentang bentuk-bentuk aset desa dalam buku tentang pengelolaan aset desa, Sutaryono dkk.(2014), berikut ini kita coba pahami mengenai aset-aset desa tersebut.

a. Aset Sumber daya Manusia

Aset sumber daya manusia adalah keahlian yang dimiliki oleh warga desa, misalnya, kemampuan warga desa dibidang menjahit, membuat ukiran, membangun rumah, dan lain-lain. Keahlian lainnya berkaitan dengan pemikiran, misalnya seorang guru yang bisa mengajarkan kepada warga desa tentang ilmu tertentu. Sumber daya manusia ini pada dasarnya adalah milik si individu, tetapi pemerintah desa bisa memanfaatkan keahlian tersebut. Misalnya pemerintah desa mendirikan sekolahan, dan para guru terlibat mengajar di sekolah itu.

b. Sumber daya Alam

Sumber daya alam misalnya berbentuk lahan perkebunan, ikan-ikan atau kerang yang ada di sungai desa, sumber air, sinar matahari, dan pohon. Sumber daya alam adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan lingkungan alam baik udara, tanah maupun air yang

memberikan penghidupan bagi masyarakat. Sumber daya alam menjadi aset/kekayaan desa manakala desa menguasai atau memiliki aset tersebut dan pemerintahan desa bersama-sama warga masyarakat terlibat dalam pengelolaannya. Penguasaan dan keterlibatan pengelolaan itu dimaksudkan untuk kesejahteraan warga desa.

c. Aset Sosial

Aset sosial pada umumnya dikaitkan dengan kolektivisme dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik. Contoh aset sosial adalah organisasi yang ada di desa, kelompok keagamaan yaitu NU, Muhammadiyah, Pemuda Katolik. Selain itu kelompok-kelompok kultural seperti kelompok paduan suara dan kelompok tari-tarian juga merupakan aset sosial. Organisasi atau kelompok di luar desa, misalnya LSM, bisa disebut aset sosial selagi berkait dengan komunitas. Misalnya, LSM Lembu Peteng bekerja dalam isu penanganan kekerasan terhadap rumah tangga di desa Sumberadi Kabupaten Sleman. LSM Lembu Peteng itu adalah aset sosial. Warga desa dan pemerintah desa bisa memanfaatkan aset sosial ini dengan cara misalnya membentuk jejaring dengan mereka. Buah dari jejaring sosial itu akan berdampak kepada, misalnya masyarakat desa menjadi semakin tahu tentang cara mengelola hutan rakyat yang ada di desa setelah mengikuti serangkaian kegiatan LSM.

Berikut ini adalah contoh bagaimana masyarakat desa mendapatkan manfaat dari aset sosial berupa organisasi. Masyarakat membentuk Asosiasi Mareje Bonga untuk mengelola kawasan hutan Mareje Bonga di Kabupaten Lombok Tengah (AMB). Asosiasi Mareje Bonga merupakan aset sosial yang lahir dari masyarakat dan kemudian didukung oleh pemerintah. Apa yang dilakukan oleh AMB berdampak bagi kesejahteraan warga. AMB adalah contoh aset sosial.

d. Aset Finansial

Aset finansial adalah segala sesuatu yang bisa kita jual, atau bisa dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis kecil-kecilan. Juga disebut aset finansial adalah kemampuan memperbaiki cara-cara menjual barang sehingga anda bisa mendapatkan uang dan menggunakan apa yang ada secara lebih bijak. Aset finansial juga bisa berupa sumber-sumber keuangan seperti tabungan, kredit, pengiriman uang sebagai hasil kerja dari luar negeri (remitansi), dan pensiun, yang memberi alternatif bagi sumber penghidupan secara berbeda. Secara lebih khusus, aset finansial desa adalah segala macam bentuk keuangan desa, baik yang bersumber dari Alokasi APBN, swadaya masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah maupun bantuan dari pihak ketiga.

e. Aset Fisik (Sarana Prasarana)

Aset fisik misalnya dalam bentuk alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat untuk pertamanan, pemancingan, alat

transportasi yang bisa disewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan, atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air, dan sebagainya. Aset fisik bisa juga disebut sebagai infrastruktur dasar (baik berupa transportasi, shelter, air, energi, komunikasi), peralatan produksi dan alat-alat yang bisa mendorong warga memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghidupan, termasuk di dalamnya adalah bangunan kantor, toko/kios dan gedung serbaguna.

f. Aset Kelembagaan

Aset kelembagaan berbentuk badan-badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya Komite Sekolah, layanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, Posyandu, layanan pertanian dan peternakan. Contoh-contoh ini biasanya memang disebut aset sosial karena berkait dengan komunitas dan bisa disebut aset kelembagaan bila disponsori atau didanai oleh pemerintah. BUM Desa yang sponsoni oleh desa merupakan contoh aset kelembagaan.

g. Aset Spiritual/Budaya

Aset ini mengenai nilai-nilai yang penting dan menggairahkan hidup seperti nilai keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-tradisi lokal dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan. Semua aset tersebut mempunyai peran yang sama dalam mendorong pencapaian cita-cita menuju kehidupan

dan kesejahteraan masyarakat dan desa yang lebih baik. Aset desa dalam berbagai bentuknya tidak akan bermanfaat dan berkembang untuk menyejahterakan warga masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Desa sebagai entitas yang terdiri dari warga masyarakat, wilayah bernaung, dan pemerintah desa dapat menjadi arena bersama untuk menyemai kehidupan dan penghidupan dengan memanfaatkan aset yang mereka miliki.

Pembangunan komunitas berbasis aset yang diperkenalkan oleh ACCESS Tahap II mengajak warga dan masyarakat desa menggali dan menemukan aset yang mereka miliki untuk dapat dikembangkan demi peningkatan kesejahteraan di berbagai bidang diantaranya sosial dan ekonomi. Aset ditempatkan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki, namun banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disadari bahwa aset tersebut dapat bermanfaat untuk meraih cita-cita di masa depan. Aset desa dalam arti luas dimiliki baik di tingkat individu dan komunitas menjadi dasar bagi warga dan masyarakat untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa kemajuan yang sangat berarti berkenaan dengan Aset Desa.

Pertama, penegasan digunakannya istilah aset desa yang memiliki makna lebih luas dari kekayaan desa. *Kedua*, bervariasinya uraian mengenai aset milik Desa baik aset fisik/infrastruktur, aset finansial, dan aset sumber daya alam. Pemerintah telah memberi pengakuan (rekognisi)

dan proteksi terhadap aset desa seperti hutan milik Desa, tambatan perahu, dan mata air milik Desa. Dengan kata lain, Pemerintah telah memberi proteksi dengan melakukan redistribusi sumber daya alam yang selama ini dikuasai oleh negara. *Ketiga*, aset finansial bukan hanya meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban APB Desa/Daerah, namun juga meliputi kekayaan desa yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan kemajuan bahwa desa mendapat pengakuan dan penghormatan sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, bukan sebagai sub sistem kabupaten/kota. *Keempat*, proteksi terhadap Aset Desa juga diberikan pada kekayaan milik desa yang selama ini telah diambil alih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Hal ini membuka upaya lebih luas bagi Desa dalam mengelola berbagai aset Desa untuk kesejahteraan warganya, sejalan dengan salah satu tujuan pengaturan Desa yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (11), yang dimaksud dengan aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan Desa, pasal 2 asas pengelolaan keuangan desa, adalah:

- a. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- b. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa PERMENDAGRI Nomor 113 tentang keuangan Desa Pasal 3 ayat :
 - 1) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - 2) Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksana APBDes;
 - b) Menetapkan PTPKD;
 - c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBdesa;

- e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- 3) Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, di bantu oleh PTPKD.

Dari beberapa pengertian di atas potensi desa atau aset desa dapat disimpulkan bahwa merupakan segala sesuatu yang ada di desa baik yang berbentuk fisik baik non fisik yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat atau adalah barang milik desa yang diperoleh atau yang dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa, yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh Desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital dan urgen bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pendapatan Desa adalah segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau sumber-sumber yang berada dibawah pengelolaan desa. Sumber pendapatan desa adalah sumber asli

pendapatan desa atau bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan Desa merupakan penerimaan uang sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pendapatan Desa Pasal 9 ayat (1) adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Dari uraian konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa

dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk merencanakan menggerakkan, mengelompokkan, mengawasi, mengatur (manajemen) segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan desa tersebut, dan sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal, baik itu yang berbentuk fisik maupun non fisik, seperti : Aset sumber daya manusia, sumber daya alam, aset sosial, aset finansial, aset sarana prasarana, aset kelembagaan, aset spritual atau budaya, dari semua aset kekayaan jika dikelola dengan baik maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Adapun aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pelaksanaan (*actuating*)
4. Pengontrolan (*controlling*)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, menurut Sugyono yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi akan tetapi menekankan pada makna sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Sugiono, 2013:3).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan dengan berbagai metode alamiah (Lexi J. Moleong. 2003).

Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti terkait dengan pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).

2. Unit analisis dan penentuan informan

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Lembaga sebagai sebuah Desa. Dan informannya adalah pihak-pihak yang dipandang memahami data yang sesuai dengan Pengelolaan Potensi Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mereka adalah aktor-aktor desa yakni: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat, dan lembaga masyarakat desa.

Dalam penelitian ini penulis mengambil informan sebanyak 10 informan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala desa 1 orang
- b. Sekretaris Desa 1 orang
- c. KAUR keuangan 1 orang
- d. Staf Kesra 1 orang
- e. BPD 2 orang
- f. Ketua LPMD 1 orang
- g. Ketua Gapoktan 1 orang
- h. Masyarakat 2 Orang

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat di cocokan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

Bahwa betul adanya kecocokan antara hasil wawancara dengan fakta sosial dilapangan yakni tentang potensi yang terdapat di desa Srigading, seperti terdapat pasar desa, lahan pertanian, kios desa, kuliner pengklik, yang dimiliki oleh desa serta pengelolaan potensi desa.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan di akhiri.

Dalam hasil wawancara bahwa terdapat potensi desa di Desa Srigading, yakni lahan pertanian yang dimiliki oleh desa

c. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal dan lain sebagainya.

Dokumen dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADes) desa Srigading
- 2) Profil Desa Srigading

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif, menurut (Kasiran, 2010:15). yang dimaksud dengan analisis Deskriptif adalah sebagai berikut :

Deskriptif adalah analisis hasil penelitian yang menggunakan data berupa kata-kata tertulis atau kalimat dari subyek yang di amati.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa kualitatif maka data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit. Dalam analisa kualitatif maka data

yang diperlukan dalam penelitian tidak di analisis menggunakan angka-angka melainkan yang diperoleh akan di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menguraikan hasil penelitian dalam bentuk narasi dengan pokok permasalahan yang terkait dengan Pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan asli desa. Tahap-tahap analisis dalam penelitian ini adalah :

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data –data tersebut diambil sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

b. Reduksi Data

Tahap selanjutnya adalah reduksi data. Reduksi data adalah tahap pemilihan data, data-data yang telah dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.

c. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

d. Penyajian data

Pada penyajian data, penulis melakukan analisis secara deskripsi dengan menjabarkan data-data yang telah dipilih sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan.

e. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan padatahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB II

PROFIL DESA SRIGADING

Dalam melakukan penelitian pada suatu wilayah dengan tujuan untuk mengetahui proses ataupun kendala yang ada dilokasi tempat penelitian. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat maupun pengeolaan potensi desa. Dalam Bab ini akan jelaskan tentang sejarah, jumlah penduduk, mata pencaharian masyarakat Srigading dan lain sebagainya.

1. Sejarah

Menurut catatan sejarah Desa Srigading merupakan gabungan 4 (empat) Kalurahan lama yaitu:

1. Kalurahan Kalidjurang
2. Kalurahan Srabahan
3. Kalurahan Pugeran
4. Kalurahan Gunung Wingko.

2. Kondisi Geografis

Wilayah Desa Srigading merupakan bagian integral dari wilayah Kecamatan Sanden yang memiliki 4 (empat) Desa. Desa Srigading memiliki wilayah seluas 758 ha yang secara administratif terbagi dalam 20 pedukuhan dan 81 RT. Secara Topografis Desa Srigading termasuk dataran rendah dengan ketinggian 2 – 10 m di atas permukaan laut, termasuk kategori desa pantai. Wilayah Desa Srigading dilewati oleh Sungai Winongo Kecil yang

dimanfaatkan untuk pengairan.

1. Batas-batas Wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tirtomulyo,
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia,
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Murtigading, Gadingharjo dan Gadinghari,
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirtomulyo, Tirtosari dan Tirtohargo.

2. Penggunaan Tanah

Separuh lebih dari luas wilayah Desa Srigading terdiri dari tanah sawah dan ladang yang dipergunakan untuk budidaya pertanian dan perkebunan dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi. Kesuburan tanah sawah ini didukung oleh saluran irigasi teknis yang memadai.

3. Jumlah Penduduk di Desa Srigading

Tabel 2.1 Jumlah penduduk dan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya yang terdapat di Desa Srigading, pada tahun 2016

No.	Laki-laki	Perempuan	Total
	4.566	4.715	9.281

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, Bantul, Tahun 2016

Dari tabel di atas membuktikan bahwa jumlah penduduk di Desa Srigadin yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yakni 4.715, dibandingkan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki yakni sebanyak 4.566.

4. Banyaknya Pasar dan Minimarket di Desa Srigading

Bahwa pasar dan minimarket merupakan tempat menyalurkan hasil kerja dari masyarakat Srigading, baik hasil kerja dari pertanian, perikanan, sayuran dan lain sebagainya. Pasar dan Minimarket dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat karena hasil yang didagangkan juga dapat meningkatkan pendapatan oleh Desa Srigading. Jumlah pasar dan Minimarket dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

No.	Pasar (Unit)	Minimarket (Unit)	Jumlah
1.	3	1	4

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, Bantul, Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa Pasar lebih banyak yakni tiga Unit, di bandingkan Minimarket yang memiliki jumlah satu Unit. Dapat dikatakan bahwa dengan terdapat tiga Unit Pasar dan satu Unit Minimarket yang terdapat di Desa Srigading dapat menunjang atau mendorong kegiatan perekonomian masyarakat dan merupakan potensi bagi Desa Srigading untuk meningkatkan pendapatan Desa tersebut.

5. Luas Lahan Pertanian yang terdapat di Desa Srigading

Desa Srigading memiliki luas yakni sebanyak 758 hektar (Ha) dan memiliki wilayah pertanian padi sawah yakni sebanyak 355 hektar (Ha), dan memiliki luas 118,5 hektar untuk tanaman bawang merah, luas lahan untuk cabe 51,9 hektar, luas lahan untuk kacang panjang sebanyak 1,5 hektar. Ini

membuktikan bahwa Desa Srigading memiliki potensi dalam bidang pertanian (padi, bawang merah, bawang putih, kacang panjang dan cabai). Dilihat dari sumber pendapatan masyarakat cukup menjanjikan serta bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

6. Lembaga Keuangan di Desa Srigading

Lembaga keuangan merupakan faktor pendukung bagi Desa Srigading maupun bagi masyarakatnya sebagai faktor pendorong untuk menabung uang bagi masyarakat dari hasil panennya. Lembaga keuangan yang terdapat di Desa Srigading dapat dilihat pada tabel berikut:

2.3 Tabel Lembaga keuangan di Desa Srigading

Lembaga Keuangan			
BRI (Unit)	BPD (Unit)	BUKP BKM (Unit)	Jumlah (Unit)
1	1	2	4

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, Bantul, Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa lembaga keuangan yang terdapat di Desa Srigading dapat mendukung masyarakat untuk menabung hasil panennya dengan jarak yang dekat.

7. Prasarana dan Sarana Desa

a. Sarana dan prasaran perhubungan

Pembangunan sarana perhubungan diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan dapat melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat Desa Srigading.

Tabel 2.4

Data Prasarana Perhubungan Desa Srigading Tahun 2016

No.	Klasifikasi	Jenis Permukaan Jalan (km)			
		Tanah	Perkerasan batu	Cor blok	Aspal
1	Jalan Propinsi	-	-	-	6
2	Jalan Kabupaten	-	-	-	3
3	Jalan Desa	-	-	-	24.220
4	Jalan Lingkungan	11.616	6.310	19.710	-

Sumber : Badan Pusat Statistik, Bantul 2016

Dapat dianalisis dari tabel di atas bahwa dengan sarana maupun prasarana yang mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Desa Srigading.

8. Pemerintahan

a. Politik

Kesadaran masyarakat dalam berpolitik telah diwujudkan dalam pemilihan kepala desa.

b. Hukum

Program pembangunan hukum yang dilakukan Pemerintah Desa Srigading pada dasarnya membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan bidang hukum kepada masyarakat seperti misalnya : bidang pertanahan,

bidang ketertiban umum, perkawinan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

9. Pemerintahan Desa

a. Kelembagaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa (Lurah, Pamong Desa atau perangkat desa). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas terhadap pemerintah desa.

b. Lembaga Desa Lainnya

Sampai tahun 2016 Kelembagaan Desa adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Desa Budaya dan Rukun Tetangga (RT), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

10. Pembagian wilayah Pedukuhan

Secara administratif wilayah Desa Srigading mempunyai 20 Pedukuhan, dan salah satunya adalah Pedukuhan Ngepet yang memiliki tujuh Rukun Tetangga. Pedukuhan Ngepet memiliki potensi desa yakni lahan pertanian yang luas, kuliner Pengklik, pantai Samas. Jika dikelola dengan baik potensi tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat maupun Pendapatan Asli Desa (PADes).

11. Pariwisata

Potensi ekonomi Desa Srigading selain pertanian adalah sektor pariwisata Pantai Samas, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Desa Srigading setiap tahunnya mendapat bantuan Desa Wisata yang nilainya setiap tahun meningkat. Pemerintah Desa Srigading berharap agar pengelolaan kawasan wisata Pantai Samas lebih ditingkatkan, sehingga menambah daya tarik wisatawan.

BAB III

ANALISIS PENGELOLAAN POTENSI DESA

UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA

Analisis data merupakan kegiatan untuk mempertajam data yang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti pada informannya yang mengidentifikasi lebih dalam tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebagai tindak lanjut dari sebuah analisis tersebut akan diinterpretasikan dari data-data yang diperoleh serta dikumpulkan dilapangan dengan menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi.

Untuk itu hendak dijawab pada analisis ini adalah bagaimana pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Hubungan dengan pengumpulan data dan informasi, penyusun menggunakan interview atau wawancara pada pihak-pihak yang terkait dengan subyek bahasan penelitian.

Pemilihan informan ditekankan pada orang-orang yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan untuk mengetahui data dan identitas informan, untuk lebih jelasnya mengenai identitas informan tersebut,berikut penjabarannya.

A. Deskripsi Informan

1. Deskripsi informan menurut umur

Untuk mengetahui umur informan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Distribusi Informan menurut umur

No	Umur Informan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	41-48	6	60
2.	54-56	2	20
3.	67-68	2	20
	Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa umur informan berkisar antara 41-68 tahun, diharapkan dapat mengetahui tentang pengelolaan potensi desa yang terdapat di Desa Srigading.

2. Distribusi informan menurut jenis kelamin

Untuk mengetahui jumlah informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Distribusi informan menurut jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase(%)
1.	Laki-laki	10	10
2.	Perempuan	-	-
	Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer 2017

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa semua yang menjadi informan tentang pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa adalah semuanya merupakan yang berjenis laki-laki.

3. Distribusi informan menurut tingkat pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Informan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah(Orang)	Persentase(%)
1.	SD	-	
2.	SMP	-	
3.	SMA SMK	2	20
4.	D3	4	40
5.	S1	4	40
	Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan informan sebagian adalah Diploma III dan sebagian adalah strata 1, dari tingkat pendidikan informan yang cukup tinggi dapat dikatakan matang dalam memberikan jawaban ataupun tanggapan tentang pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

4. Distribusi informan berdasarkan kedudukan

Untuk mengetahui informan berdasarkan kedudukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Tingkat Kedudukan

No	Kedudukan	Jumlah (Orang)	Persentase(%)
1.	Pemerintah Desa	4	40
2.	BPD	2	20
3.	Lembaga Kswadaya masyarakat	2	20
4	Masyarakat	2	20
	Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer 2017

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterwakilan informan dari setiap kedudukan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan potensi desa untuk meningkat pendapatan asli desa cukup matang atau cukup baik.

B. Analisis Pengelolaan Potensi Desa

Setelah melakukan penelitian tentang pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, yang dilakukan di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Berikut ini akan dilakukan analisis data berdasarkan indikator-indikator penelitian yang digunakan.

1. Analisis Pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PADes)

a. Analisis Potensi desa (Keadaan Deskriptif Desa Srigading)

Potensi Desa

Potensi desa adalah segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yg terdapat dan tersimpan di desa yang dapat dimanfaatkan untk kelangsungan dan perkembangan desa tersebut.

Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

Potensi desa terbagi menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi non fisik.

1. Potensi fisik

Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa seperti tanah, air, lahan pertanian, hewan ternak, cuaca iklim dan lainnya. Lokasi desa di Indonesia berbeda-beda karena kenampakan fisik dan morfologi Indonesia beranekaragam mulai dari dataran rendah, pantai, bukit sampai pegunungan. Perbedaan kenampakan fisik tersebut akan berpengaruh terhadap jenis potensi desa yang bersangkutan. Misalnya di desa yang berlokasi di wilayah pantai maka dapat diketahui kondisi cuaca dan iklim di daerah tersebut adalah panas. Sedangkan sumber daya alam yang ada di pantai antara lain tambak, kelapa, ikan, terumbu karang

dan lainnya. Beda halnya dengan di wilayah dataran tinggi yang berhawa sejuk maka potensi fisik desanya akan berupa daerah pertanian yang subur, sayuran, dan hewan ternak.

2. Potensi non fisik

Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparaturnya, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri.

(<https://geograph88.blogspot.co.id/2014/11/potensi-fisik-dan-non-fisik-desa.html>)

Disetiap desa kita akan menemukan potensi-potensi, namun disetiap desa berbeda potensi yang dimiliki, yakni terdapat desa memiliki potensi pariwisata, budaya, pertanian, kuliner, kerajinan dan lain sebagainya.

Di Desa srigading juga memiliki potensi yakni potensi pariwisata, pertanian, kuliner, budaya. Jika dikelola potensi tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat atau dapat meningkatkan pendapatan desa.

Menurut Bapak Wahyu Widodo selaku kepala Desa Srigading, mengatakan bahwa :

Srigading memiliki potensi-potensi yaitu potensi alam yang terdiri dari : pantai samas, lahan pertanian, sungai irigasi, dan

potensi budaya yakni: terdapat wayang, hadro, srandul, gamelan, ketoprak, pengelolaan potensi sampah, potensi laut uji coba pembuatan garam, kuliner pengklik dan kuliner kampung bebek. Serta nilai agama (*Hasil wawancara, 7 Maret 2017*).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Desa Srigading memiliki potensi-potensi jika dikelola dengan baik, seperti tetap mengelola potensi budaya walaupun dengan perkembangan zaman namun Desa Srigading tetap melestarikan budaya sebagai karakter desa itu sendiri. Maka desa srigading menjadi pusat kuliner maupun menjadi pariwisata dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa, dengan meningkatnya pendapatan asli desa akan meningkat juga dana transfer dari pusat. Potensi-potensi tersebut jika dikelola dengan baik maka akan meningkatnya Pendapatan Asli Desa,

Sebagaimana penjelasan oleh Bapak Sulistyanto selaku kaur keuangan, bahwa:

Potensi desa yang terdapat di Srigading adalah tanah kas desa, pengembalian pajak dan retribusi, lahan pertanian, dan pantai Samas.

Sama halnya yang disampaikan oleh Ignasius Bapak Dwi Krsidyanto selaku sekretaris desa, mengatakan:

Potensi desa yang terdapat di Desa Srigading yakni: lahan pertanian, budaya, wisata pantai Samas, dan pantai Samas juga sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, pengelolaan kuliner.

Dan juga disampaikan oleh Bapak Widyatmoko dan Bapak Dalijo selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

Potensi desa yang terdapat di Desa Srigading adalah pertanian, pariwisata, perikanan, seni budaya.

Dari informasi diatas bahwa Desa Srigading memiliki potensi-potensi seperti kuliner selain meningkatkan pendapatan masyarakat juga sebagai lowongan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran yang terdapat di srigading.

Bapak Djubarso selaku ketua BPD mengatakan bahwa:

Potensi-potensi yang terdapat di Desa Srigading yakni sumber daya alam yakni lahan pertanian yang sebagian wilayah srigading merupakan lahan pertanian, pertanian seperti padi yang musim tanannya dua kali dalam setahun dan juga tanaman cabai, bawang merah, terong. *(Hasil wawancara, 6 Maret 2017)*

Menurut Bapak ST Sugiarto selaku ketua LPMD mengatakan bahwa:

Potensi-potensi desa yang terdapat di Desa Srigading adalah lahan pertanian, masyarakat mayoritas sumber penghasilannya merupakan hasil pertanian dan destinasi wisata pantai samas, serta kuliner bebek maupun kuliner Pengklik kuliner menu laut maupun bebek. *(Hasil wawancara, 7 Maret 2017)*

Dari penjelasan di atas bahwa Desa Srigading untuk hasil pertanian tidak ragu karena sebagian wilayahnya adalah wilayah pertanian, dan wisata pantai samas sebagai potensi untuk menarik wisatawan untuk berwisata dipantai selatan khususnya di pantai samas, dan desa srigading menawarkan kuliner pegklik dengan menu ikan laut dan bebek.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Slamet Subandi selaku ketua Gapoktan bahwa :

Potensi yang terdapat di Desa Srigading yakni pantai Samas, kebudayaan, lahan pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan hasil panen, gapoktan berusaha untuk terapkan sistem atau pola tanam dan memilih benih yang baik (*Hasil wawancara, 8 Maret 2017*).

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa potensi-potensi yang terdapat di Desa Srigading merupakan sumber daya alam yakni lahan pertanian yang luas, lahan pertanian tersebut menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat, karena petani menanam dalam setahun dua kali musim panen, dan lebih dari itu masyarakat juga menanam bawang merah, cabai, tomat, sayur-mayur, terong dan lain sebagainya, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dengan tanaman tersebut, masyarakat menjadi produktif (mandiri) dan kurangnya ketergantungan dari pemerintah, masyarakat memenuhi kebutuhannya dan menjadi pemasok barang mentah untuk kota.

Pantai Samas sebagai potensi, potensi bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa srigading karena Pantai Samas bisa dijadikan sebagai destinasi wisata maupun menambah penghasilan dari nelayan dengan hasil lautnya. Dan kuliner Pengklik sebagai salah satu penyedia lapangan pekerjaan bagi yang pengangguran serta dapat meningkatkan penghasilan bagi masyarakat maupun meningkatkan Pendapatan Asli Desa bagi Desa Srigading.

b. Aset desa yang terdapat di desa srigading

Aset desa merupakan kekayaan bagi desa kekayaan bagi desa tersebut seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (11), yang dimaksud dengan aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Jika dikelola aset desa tersebut dengan baik maka akan berdampak akan meningkatnya pendapatan desa serta dapat digunakan untuk pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Widodo selaku kepala desa, mengatakan bahwa:

Aset Desa yang terdapat di Desa Srigading adalah pasar desa, sewa tanah desa (kas desa), sewa gedung (aula, kursi), Pengklik kuliner, lapangan Srigading, kios desa (Hasil wawancara, 7 Maret 2017)

Pengelolaan aset desa sebagai salah satu pendapatan Desa Srigading, dan dapat meningkatkan pembangunan bagi desa srigading maupun masyarakatnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sulityanto selaku KAUR keuangan

Aset Desa Srigading terdiri dari lapangan Srigading, pasar desa, tanah kas desa, kios desa, kuliner Pengklik (*Hasil wawancara, 7 Maret 2017*).

Hal senada juga dikatakan Bapak IG. Dwi Krisdyanto selaku Sekretaris desa, Bapak Djuharso selaku ketua BPD, ST sugiarto selaku ketua LPMD, Slamet Subandi selaku ketua Gapoktan, mengatakan bahwa :

Aset desa yang terdapat di Desa Srigading adalah pasar desa, lapangan Srigading, kios desa, aula Srigading.

c. Aset Desa Srigading yang sudah menghasilkan pendapatan asli desa

Aset Desa merupakan kekayaan bagi desa tersebut dan jika dikelola dengan efisien dan efektif maka akan menambah pendapatan bagi desa tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Sulistyantoro selaku KAUR bagian keuangan, bahwa :

Aset desa yang sudah menghasilkan pendapatan asli desa yakni pasar desa, lapangan Srigading, aula (gedung serba guna) kios desa, lahan pertanian yang disewakan kepada masyarakat (*Hasil wawancara, 7 Maret 2017*).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Wahyu Widodo selaku kepala desa, IG. Dwi krisdyanto selaku sekretaris, Djuharso selaku ketua BPD, IG.sugiarto selaku ketua LPMD, Bapak Slamet subandi selaku ketua gapoktan.

Aset Desa Srigading yang sudah menghasilkan pendapatan asli desa adalah pasar desa, lapangan Desa Srigading, kios desa, aula atau gedung serba guna (*hasil wawancara, 8 maret 2017*)

Dan Juga disampaikan oleh Bapak Dalijo selaku masyarakat, mengatakan bahwa :

Aset desa yang terdapat di Desa Srigading yakni pasar Desa, Pengklik, tanah kas Desa.

Dari hasil wawancara di atas bahwa aset desa di Srigading adalah pasar Desa, Pengklik, lapangan Desa, tanah kas Desa, aula Desa, dari beberapa aset desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

1. Perencanaan

Bahwa untuk mencapai tujuan, tentunya merupakan usaha atau kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki, seperti dalam merencanakan pemanfaatan potensi yang ada di desa mulai dari proses maupun cara untuk pemanfaatan potensi desa agar berguna bagi desa tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahyu Widodo, selaku kepala Desa Srigading, bahwa:

Dalam proses perencanaan pemanfaatan potensi desa, desa srigading mendirikan BUMDes (Pengklik kuliner), dalam mendirikan BUMdes agar potensi yang ada dapat berguna bagi desa maupun masyarakat, seperti menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa tersebut, agar masyarakat tidak mencari kerja di perkotaan, dan dapat menambah penghasilan. Pengelolaan sampah, adanya pengelolaan sampah kita tahu bahwa sampah mungkin ada dipikiran kita bahwa itu buruk namun kalau kita memiliki kreatif bahwa sampah bukan lagi buruk melainkan sampah

adalah salah satu potensi, karena masyarakat dapat kreatif dapat mengurangi pencemaran lingkungan, menambah penghasilan masyarakat. Pengelolaan wisata pantai samas, pengelolaan wisawata di pantai samas dapat meningkatkan penghasilan masyarakat mulai dari kuliner maupun retribusi parkir. Dalam merencanakan pemanfaatan potensi desa, Pemerintah Desa Srigading mengadakan musyawarah dengan BPD, Lembaga Kesewadayaan Desa (LKD),, jika pengelolaan potensi desa dengan baik maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. (*Hasil wawancara, 8 Maret 2017*)

Hal tersebut senada diungkapkan oleh Bapak Djuharso selaku ketua BPD, Desa Srigading, bahwa:

Perencanaan pemanfaatan potensi desa, mulai dari musyawarah desa tentang rencana pembangunan ditingkat desa, dan dana pembangunan akan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), muai dari menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), menyusun draf rencana APBdes, penetapan APBdes. (*Hasil wawancara, 9 Maret 2017*)

Namun sedikit berbeda dengan yang dikatakan Bapak St. Sugirato selaku ketua LPMD, bahwa :

Perencanaan pemanfaatan potensi desa dimulai dari musyarawarah dusun, setelah musyawarah dusun dilanjutkan dengan musyawarah desa. (*Hasil wawancara 9 Maret 2017*)

Dari hasil wawancara di atas, bahwa dalam perencanaan ppemanfaatan potensi desa dimulai dari musyawara dusun dan selanjutnya akan di bawah ke musyawarah desa, pemanfaatan tersebut seperti mendirikan BUMDes, BUMDes tersebut agar bisa menyediakan lapangan kerja dan penambahan penghasilan bagi

masyarakat desa Srigading, Pengelolaan sampah, bahwa sampah biasanya yang terlintas dipikiran kita adalah malapetaka (hal buruk) bagi masyarakat, namun sampah jikadi olah dengan kreatifitas akan mendatang rezeki bagi masyarakat maupun desa serta dapat menyelamatkan manusia dari lingkungan yang tercemar, menambah penghasilan bagi masyarakat.

Dalam perencanaan pemanfaatan ssesautu tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan atau kerja sama dari pihak lain agar bisa mencapai tujuan yang kita rencanakan, seperti dalam perencanaan pemanfaatan potensi desa, di desa srigading banyak pihak yang terlibat dalam proses tersebut,

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Widodo selaku kepala desa, Desa Srigading, bahwa :

Dalam proses perencanaan pemanfaatan potensi desa, tentunya kami tidak bekerja sendiri, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yakni : pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa, Lembaga Kesewadayaan desa (LPMD, karang taruna, para pengelola wisata, gapoktan).
(Hasil wawancara, 10 Maret 2017)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak IG. D. Krisdiyanto selaku sekretaris desa, Sulistiyanto, selaku KAUR bagian Keuangan, Djubarso Selaku ketua BPD, bahwa :

Dalam proses perencanaan potensi desa ada beberapa pihak yang terlibat yakni BPD, Pemerintah Desa, LPMD, GAPOKTAN, karang taruna, kelompok sadar wisata (POKDARWIS) *(Hasil wawancara 14 Maret 2017)*

Dari hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa proses perencanaan pemanfaatan potensi desa bukan satu pihak yang bekerja sendiri namun di bantu oleh pihak lain yang merupakan satu sistem untuk mengelola potensi desa dan situ transparansi, demokratis untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa, sudah cukup baik keterlibatan beberapa pihak yang dianggap penting yakni Badan Permusyawartan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), kelompok sadar wisata (POKDARWIS) maupun lembaga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Dalam proses setiap kegiatan yang pastinya akan terdapat kendala yang di temukan, yakni dalam dalam perencanaan pemanfaatan potensi desa srigading menemukan kendala

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Widodo, selaku kepala Desa Srigading, bahwa :

Kendala yang dihadapi dalam perencanaan pemanfaatan potensi desa adalah Dana atau anggaran yang terbatas denngan keinginan masyarakat ataupun desa yang lebih, bahwa APBdes terbatas kurang sesuai dengan apa yang kita (desa) rencanakan untuk pembangunan, dan Kendala lain adalah kami (Desa) sadari bahwa Kemampuan Sumber daya manusia (SDA) yang terbatas, kurang mampu mengelola potensi yang ada. (*Hasil wawancara, 14 Maret 2017*)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak St Sugiarto selaku ketua LPMD Desa Srigading, Bahwa :

Kendala yang dihadapi dalam perencanaan pemanfaatan potensi desa adalah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga kurang memahami proses melaksanakan pemanfaatan potensi desa. (*Hasil wawancara, 7 Maret 2017*)

Namun ungkapan yang berbeda dari Bapak IG. Dwi Krisdyanto, selaku sekretaris desa, bahwa :

Dalam perencanaan pemanfaatan terdapat kendala yakni perencanaannya kurang maksimal dan juga sumber daya manusia yang terbatas. (*Hasil wawancara, 7 Maret 2017*)

Ungkapan yang berbeda dari Bapak Sulistyanto selaku KAUR bagian keuangan, bahwa:

Kendala yang dihadapi dalam perencanaan pemanfaatan potensi desa adalah Orang terkait dalam rapat koordiansi atau musyawarah jarang mengikuti rapat karena kesibukan. (*Hasil wawancara 8 Maret 2017*)

Dari hasil wawancara di atas menentukan bahwa kendala yang di hadapi dalam proses perencanaan pemanfaatan potensi desa, berbagai macam kendala yakni menyadari bahwa sebagai manusia biasa bahwa Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, dimana sumber daya manusia sebagai penggerak dalam segala sesuatu, untuk menentukan berhasil tidak sebuah perencanaan sangat berpengaruh penting bagi SDA, perencanaan yang kurang maksimal juga akan menentukan berhasil tidaknya sebuah tujuan, jika perencanaannya kurang matang maka dalam pelaksanaan akan kita temukan kendala-kendala bahkan hasilnya tidak maksimal juga, serta ketika banyaknya kesibukan akhirnya tidak

memfokuskan sesuatu akhirnya kurang tepat sasaran dalam tujuan perencanaan pemanfaatan potensi desa.

2. Pengorganisasian

Dalam pengorganisasian (mengaplikasikan, pengelompokan, tanggungjawab) merupakan sebuah hal yang penting, karena tanpa pengorganisasian maka akan terjadi kekacauan dalam sebuah kegiatan, pengorganisasian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam salah satu kegiatan kerja, sama halnya dalam pengorganisasian potensi desa akan dibuat dengan masing-masing kelompok potensi yang terdapat di desa Srigading, Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Widodo. Selaku kepala Desa Srigading, bahwa:

Membuat salah satu lembaga untuk menyatukan masyarakat, baik itu yang bergerak dibidang profit, yang bergerak di bidang profit yakni BUMDes, POKDARWIS, pengelolaan lahan pertanian, dan yang bergerak dibidang sosial atau pemberdayaan, seperti: karang taruna, LPMD, kelompok agama, itulah pengelompokan atau pengorganisasian di Desa Srigading. (*Hasil wawancara, 8 Maret 2017*)

Hal berbeda yang diungkapkan oleh Bapak Ig. Dwi Krisdyanto, selaku sekretaris desa, bahwa:

Dalam tahap pengorganisasian, awalnya dibuatkan Peraturan Desa (PERDES) sebagai dasar hukum dari pembentukan setiap kelompok untuk mengelola sesuai dengan tujuan dibentuknya, setelah pembuatan PERDES dilanjutkan pembentukan pengurus masing-masing lembaga, lalu pembentukan pengelolaan potensi desa sesuai dengan yang ditetapkan. (*hasil wawancara, 9 Maret 2017*)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Djubarso, selaku ketua BPD, Bahwa :

Dalam pengorganisasian dibuatkan Peraturan desa tentang Lembaga Keswadayaan desa (LKD) agar menjadi dasar hukum untuk melaksanakan suatu kegiatan (*Hasil wawancara, 8 Maret 2017*).

Dari hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa dalam pengorganisasian potensi desa, dikelompokkan terlebih dahulu pengurus yang mengurus potensi desa tersebut baik yang profit maupun yang bergerak di bidang sosial maupun pemberdayaan, dan harus memiliki landasan hukum yakni dalam hal ini adalah peraturan desa (PERDES), dibuat landasan hukum dan pengurusnya agar bekerja dengan masing-masing tanggungjawab atau tugas pokok dan fungsi agar bekerja secara sistematis, tidak terjadi pendobelan maupun yang tidak memiliki tanggungjawab.

Dalam melakukan pengorganisasian tentunya bukan hanya satu pihak yang terlibat dalam proses tersebut, agar bisa mencapai visi yang telah ditetapkan dan juga berjalan sesuai dengan rencana, karena kemampuan satu orang atau satu pihak mungkin tidak maksimal sehingga membutuhkan orang-orang agar bisa bekerja sama atau yang terlibat dalam kegiatan pengorganisasian potensi desa.

Seperti yang diungkapkan Bapak Wahyu Widodo kepala desa, mengatakan bahwa:

Dalam pengorganisasian yang terlibat ada beberapa pihak yakni pemerintah desa, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, tokoh masyarakat, BPD, dan pemerintah desa. (*Hasil wawancara, 8 Maret 2017*).

Seperti yang diungkapkan juga oleh Bapak Djubarso selaku ketua BPD, mengatakan bahwa:

Dalam pengorganisasian yang terlibat ada beberapa pihak yakni tokoh masyarakat, BPD, dan pemerintah desa. (*Hasil wawancara, 8 Maret 2017*).

Juga diungkap oleh Bapak Sulistyantoro, selaku KAUR bagian keuangan, mengatakan bahwa:

Yang terlibat dalam pengorganisasian adalah Kepala seksi sebagai pelaksana, bendahara, sekretaris dan kepala desa. (*Hasil wawancara, 9 Maret 2017*).

Dari hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa dalam pengorganisasian potensi desa yang tentunya ada beberapa sosok penting yang terlibat agar bisa berbagi tugas maupun saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni yang terlibat adalah mereka adalah pemerintah desa sebagai pelaksana, fasilitator, dan BPD sebagai lembaga pengawasan atau pengontrol kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa serta Lembaga Keswadayaan Desa sebagai pelaksana.

Dalam melakukan pengorganisasian tentunya memiliki kendala yang dihadapi oleh setiap insan yang menjalankan pengorganisasian tersebut, baik itu dari manusianya itu sendiri

maupun pada objek alam yang kita hadapi, maupun kendala finansial sebagai salah satu modal dalam mengembangkan suatu potensi yang terlibat dalam desa tersebut,

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahyu Widodo, selaku kepala Desa Sriagding, mengatakan bahwa:

Kendala yang dihadapi dalam pengorganisasian yakni kami mengakui bahwa keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) dalam pengorganisasian sesuatu untuk mengelola potensi yang ada. Dan Kesadaran yang masih minim. dari pemerintah desa maupun masyarakat dalam pengorganisasian suatu kelompok untuk mencapai tujuan. *(Hasil wawancara, 8 Maret 2017).*

Berbeda dengan yang diungkapkan Bapak Sulistyanto KAUR bagian keuangan, mengatakan bahwa:

Dalam pengorganisasian potensi desa khususnya bagian pertanian(kas desa lahan pertanian milik desa) banyak masyarakat yang lambat pembayaran karena alasan hasil panen yang kurang maksimal dan berbagai alasan lainnya. *(Hasil wawancara, 9 Maret 2017).*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak IG. Dwi Krisdyanto, selaku sekretaris desa, mengatakan bahwa :

Dalam pengorganisasian khususnya bagian pertanian yakni warga yang menyewa lahan sawah milik desa, sering membayar tidak tepat waktu yang ditentukan. *(Hasil wawancara, 9 Maret 2017).*

Dari hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa pemerintah desa dalam melakukan pengorganisasian menyadari bahwa kekuatan utama adalah kemampuan manusia yang paling

utama dalam dunia namun kenyataannya yang menjadi kendalanya yang ditemukan dilapangan adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk mengorganisasikan potensi desa yang terdapat di Desa Srigading, dan kesadaran manusia yang kurang didukung sehingga pengorganisasian potensi desa sering terhambat karena kurangnya kesadaran dari manusia itu sendiri, serta hasil panen petani yang kurang maksimal sehingga menyebabkan mereka seakan-akan kurang tepat waktu dalam membayar penyewaan tanah kas desa, karena masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuhan pokoknya.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan kegiatan proses kerja yang sesuai dengan tugas pokok maupun fungsi dari masing-masing individu atau kelompok. Pelaksanaan adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi (George R. Terry (2006 : 342) dengan tujuan Menciptakan kerja sama yang lebih efisien, Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf, Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan, Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Widodo, selaku kepala Desa Srigading, bahwa:

Dalam pergerakan atau pelaksanaan pemanfaatan untuk mengelola potensi desa ada target atau konsep, seperti jangka menengah dan jangka panjang agar para pamong desa maupun lembaga yang ada di desa mereka bekerja sesuai dengan visi atau tujuan yang telah ditetapkan, dan bekerja sesuai setia dengan ajaran agama dan budaya. *(Hasil wawancara, 8 Maret 2017)*

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak IG. Dwi Krisdyanto, selaku sekretaris desa, bahwa:

Pelaksanaan dipercayakan oleh pihak pengelola potensi desa, seperti kuliner pengklik yang dipercayakan oleh beberapa warga desa yang mengelola untuk bejadi wisata tersebut *(Hasil wawancara, 8 Maret 2017)*

Dari uraian di atas dapat di analisis bahwa pelaksanaan pemanfaatan potensi desa pemerintah desa srigading memiliki target ataupun konsep untuk melaksanakan sesuai dengan visi Desa Srigading, dan menjalankan tugas setia pada ajaran agama maupun budaya setempat.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan potensi di desa tentunya satu pihak belum mampu untuk mengelola potensi yang ada desa tersebut agar bisa bermanfaat, dan ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Widodo, selaku kepala Desa Srigading, bahwa :

Yang melaksanakan pemanfaatan potensi desa ada beberapa pihak yang terlibat yakni pemerintah desa dan lembaga Ksewadayaan desa yang dibentuk sesuai dengan

masing-masing tugas dan fungsinya. (*Hasil wawancara, 7 Maret 2017*)

Hal berbeda yang diungkapkan oleh Bapak Ig, Dwi Krisdiyanto, mengatakan bahwa:

Pelaksanaan pemanfaatan potensi desa adalah masyarakat Desa Srigading.

Dari uraian di atas bahwa dapat di analisis, dalam pelaksanaan pemanfaatan potensi desa adalah pemerintah desa dan masyarakat ini mencerminkan bahwa pemerintah desa maupun masyarakat turut ambil bagian dalam pembangunan desa khususnya dalam pemanfaatan potensi desa.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan potensi tentunya memiliki kendala karena faktor dari manusia itu sendiri maupun dari materi ataupun finansial.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Widodo, selaku kepala Desa Srigading bahwa:

Kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pemanfaatan potensi desa yakni kesadaran masyarakat, kadang masyarakat acuh tak acuh dengan pembangunan, dan sumber daya manusia bagi pelaksana yang terbatas, anggaran yang terbatas kurang sesuai dengan perencanaan awal yang membutuhkan modal lebih banyak (*Hasil wawancara, 8 Maret 2017*)

Namun pernyataan yang berbeda dari Bapak IG. Dwi Krisdiyanto, selaku ketua LPMD bahwa:

Administrasi laporan dan yang kurang lengkap karena kurangnya sumber daya oleh masyarakat (*Hasil wawancara, 8 Maret 2017*)

Dari hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan masih merupakan masalah yang menjadi kebiasaan yakni kurangnya kesadaran dari masyarakat dan sumber daya manusia yang masih terbatas untuk pelaksanaan pemanfaatan potensi desa.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pengawasan yakni Untuk mengetahui dengan intruksi-intruksi dalam azas-azas yang telah diperintahkan, Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam pekerjaan atau bekerja, Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan efektif atau efisien, Untuk mencari jalan menuju kearah perbaikan (Sukarno (1982 : 165).

(<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>)

Sesuai yang diungkapkan oleh Bapak IG. Dwi Krisdyanto, selaku sekretaris Desa Srigading, bahwa :

Dalam melakukan pengawasan jika para pihak pengontrol menemukan permasalahan maka mereka akan memberikan solusi. (*Hasil Wawancara, 10 Maret 2017*)

Dari hasil wawancara di atas dapat di analisis bahwa pengontrolan memeriksa atau mengevaluasi sebuah pekerjaan yakni pemanfaatan potensi desa,

Dalam melakukan pengontrolan terhadap lembaga lain tentunya bukan hanya satu lembaga yang melakukan pengawasan namun ada beberapa pihak yang terlibat,

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Widodo, selaku kepala Desa Srigading, bahwa:

Yang melakukan pengawasan ada beberapa pihak yang terlibat dalam hal tersebut yakni BPD maupun lembaga Keswadayaan masyarakat maupu pemerintah desa itu sendiri.

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa bisa sudah sesuai dengan landasan hukum yang ada, secara transparansi Pemerintah Desa Srigading sudah transparansi karena pemerintah sendiri transparansi kepada masyarakat maupun BPD dan Lembaga Swadaya masyarakat.

Setiap kegiatan pasti memiliki kendala yang dihadapi sama halnya juga dalam proses pengawasan pemanfaatan potensi Desa Srigading,

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Djubarso selaku ketua BPD bahwa:

Sumber daya manusia yang masih terbatas untuk melakukan pengawasan dan kesadaran masyarakat untuk mengontrol bagi pemerintah maupun lembaga yang bekerja (*Hasil wawancara, 10 Maret 2017*)

Dari uraian di atas dapat di analisis bahwa, kendala yang dihadapi dalam pengawasan adalah masalah yang krusial karena kesadaran masyarakat yang masih minim untuk mengontrol pemerintah desa, bisa saja pemerintah desa mengalami kekeliruan dalam menjalankan tugas lebih khususnya dalam pemanfaatan potensi desa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan maka penulis berkesimpulan bahwa pengelolaan potensi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat simpulkan:

1. Perencanaan (*Planning*) Pemanfaatan potensi desa

Dalam perencanaan pemanfaatan potensi desa, pemerintah Desa Srigading membentuk lembaga keswadayaan desa, lembaga keswadayaan desa terdiri dari : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa, kelompok sadar wisata, gabungan kelompok tani, lembaga agama, badan usaha milik desa, lembaga ksewadaya desa di bagi menjadi dua bagian fokusnya yakni lembaga yang mengejar profit dan lembaga sosial, dan masing-masing lembaga memiliki landasan hukum, dalam perencanaannya mereka memiliki target-target masing, serta kendalanya adalah sumber daya manusia yang terbatas, kesadaran masyarakat dalam partisipasi dan kadang perencanaan kurang maksimal.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Dalam pengorganisasiannya atau pengelompokkan, pemerintah Desa Srigading membuat peraturan desa untuk setiap lembaga yang terdapat di desa kemudian dibuat peraturan desa sebagai landasan hukum dalam pengelolaan potensi yang terdapat di Desa Srigading, dalam pengorganisasian terdapat kendala yakni sumber daya manusia yang terbatas dalam pemerintah desa maupun lembaga swadaya desa (LKD).

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Dalam pelaksanaannya pemanfaatann potensi yang terdapat di Desa Srigading, mulai dari awal pelaksanaannya cukup bagus, seperti potensi badan usaha milik desa kuliner Pengklik, awalnya ramai karena lokasinya berada di tengah sawah, dekat dengan hutan mangrove dan dekat dengan pantai selatan yakni pantai Samas, dalam pelaksanaannya potensi di bidang pertanian sangat lancar karena yang menyewa lahan pertanian dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan penyewaan dari luar pemerintah Desa Srigading, yang ikut terlibat dalam pelaksanaan yakni pemerintah desa, BPD, lembaga yang mengelola dalam bidang tersebut. Serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaa pemanfaatan potensi desa yakni sumber daya manusia yang terbatas baik pemerintah desa maupun pelaksanaan, kurangnya kesadaran dari masyarakat, seperti bagian pertanian dalam pembayaran ke pemerintah desa tidak tepat waktu, kebersihan pantai Samas yang tidak dijaga atau masih kumuh serta Pekerja Seks Komersial (PSK) ilegal.

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengawasan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan atau dilaksanakan, pengawasan terhadap kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah desa maupun oleh badan permusyawaratan desa(BPD) serta lembaga keswadayaan masyarakat (LKD).

B. Saran

1. Dalam perencanaan pemanfaatan potensi desa harus direncanakan secara matang dan sumber manusia harus diperhatikan karena sumber manusia sebagai ujung tombak yang utama dalam setiap kegiatan khususnya dalam perencanaan pemanfaatan potensi desa,serta kesadaran masyarakat harus ditingkatkan karena tanpa kesadaran masyarakat dan pemerintah desa atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan.
2. Dalam pengorganisasian harus didukung juga sumber daya manusia yang memadai agar bisa memahami tentang tujuan yang sudah ditetapkan oleh setiap kelompok atau lembaga yang sesuai dengan tujuan masing-masing lembaga atau pemerintah desa.
3. Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan tugas pokok maupun fungsi dalam bekerja, serta kesadaran untuk membayar atas lahan yang dipakai karena lahan pertanian sebagai salah satu potensi Desa Srigading.
4. Dalam melakukan pengawasan harus secara optimal agar bisa memberikan solusi jika menemukan permasalahan dalam proses pengelolaan pemanfaatan potensi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifiddin 2010. Teori Pengelolaan. Tersedia www.academia.edu 12213778 teori_pengelolaan diakses 15 Februari 2017
- Badan Pusat Statistik Bantul. 2016. Statistik Daerah Kecamatan Saden. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Bantul
- Badan Pusat Statistik Bantul. 2016. Kecamatan Saden Dalam Angka 2016. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik
- Ernie Tisnawati, Sule Kurniawan Saefullah. 2012, Pengantar Manajemen, Kencana Prenada Media Group
- George R. Terry. 2014, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta Bumi Aksara
- John D. Millet dalam Burhanuddin 1994 Fungsi Pengelolaan. Tersedia <http://www.fungsipengelolaan.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> di akses 13 16 Januari 2017
- Kasiran. 2010. Deskriptif kualitatif. Tersedia <http://www.Deskriptif.edu> diakses tanggal 12 Januari 2017
- Lexi J. Moleong. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Malayu S.P. Hasibuan. 2003, *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Notoatmodjo. 1992, Manajemen Sumber Daya Manusia. Tersedia www.ManajemenSumberDayamanusia.edu diakses 10 Februari 2017
- Peter Salim dan Yenni Salim. 2002. Tersedia <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> diakses tanggal 18 Februari 2017
- Sugiono, 2013. Metode Penelitian. Tersedia www.Metodepenelitian.Com
- Soewarno Handyaningrat. 1997. Pengertian Pengelolaan. Tersedia <http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html> diakses tanggal 18 Februari 2017

Sutaryono, dkk. 2014. *Pengelolaan Aset Desa*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Masyarakat Desa (FPPD).

Sutopo, 115220149, Upaya kepala Desa dalam meningkatkan PADes, Skripsi, APMD, 2015.

Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, *Buku Saku Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

<https://inirumahpintar.blogspot.com/2016/10/pengertian-dan-contoh-potensi-desa.html>

(<https://geograph88.blogspot.co.id/2014/11/potensi-fisik-dan-non-fisik-desa.html>)

[www.academia.edu](http://www.academia.edu/12213778) 12213778 teori_pengelolaan

<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html>

Sumber Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 113 tahun 2104 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.

INTERVIEW GUIDE

Nama :
Umur :
Jabatan :
Tingkat Pendidikan :
Jenis Kelamin :

Deskripsi desa adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Potensi-potensi desa yang terdapat di Desa Srigading?
2. Apa saja aset-aset desa yang terdapat di Desa Srigading?
3. Apa saja Aset-aset desa yang sudah dimanfaatkan dan menghasilkan PADes?
 - 1) Perencanaan
 - a. Bagaimana pemerintah Desa merencanakan pemanfaatan potensi desa?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam perencanaan potensi desa?
 - c. Kendala yang dihadapi dalam menyusun perencanaan?
 - 2) Pengorganisasian
 - a. Bagaimana pemerintah desa dalam mengorganisasikan pemanfaatan potensi desa?
 - b. Siapa yang mengorganisasikan dan yang terlibat dalam pengorganisasian potensi desa?
 - c. Kendala yang dihadapi dalam menyusun pengorganisasian?
 - 3) Pelaksanaan atau pergerakan (actuating)
 - a. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan pemanfaatan potensi desa?
 - b. Siapa yang melaksanakan dan yang terlibat dalam pelaksanaan potensi desa?
 - c. Kendala yang dihadapi dalam menyusun pelaksanaan ?
 - 4) Pengontrolan (controling)
 - a. Bagaimana pemerintah Desa dalam mengawasi potensi desa?
 - b. Siapa yang terlibat dalam pengawasan potensi desa?
 - c. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan potensi desa?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ketua BPD



Wawancara dengan Mujiman Bagian Kesra



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Sulistyanto selaku Kaur Keuangan



Wawancara dengan Ketua LPMD St. Sugiarto



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



Wawancara dengan Sekretris Desa Bpk Dwi Kristiyanto



Wawancara dengan Bapak Subandi Ketua Gapoktan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 2 Maret 2017

Nomor : 074/2102/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul
Kabupaten Bantul
Di
BANTUL

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
"APMD" Yogyakarta
Nomor : 150/II/U/2017
Tanggal : 1 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PENGELOLAAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) (STUDI PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA SRIGADING, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL, DI YOGYAKARTA)"** kepada :

Nama : EDISON LEDI BULANG
NIM : 13520043
No. HP/Identitas : 082300183915 / 5312122009940001
Prodi/Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas/PT : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DIY
Waktu Penelitian : 2 Maret 2017 s.d. 31 Maret 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DIH STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU SOSIOTRI S1 STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCA SARJANA S2 TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 061/I/T/2017

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

- Nama : EDISON LEDI BULANG.
Nomor Mahasiswa : 13520043.
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
- Tempat : Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DIY
 - Sasaran : Pengelolaan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta)
 - Waktu : 01 Maret 2017 s.d. selesai.

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 01 Maret 2017



Habib Mubsin, S.Sos., M.Si.
170 230 189

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan wajib penelitian.



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DIII STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU SOSIETRI SI STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI STAT. TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STAT. TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PASCA SARJANA STAT. TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 150/IU/2017
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Jl. Jendral Sudirman No.5
Yogyakarta 55233

Dengan hormat,
Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 01 Maret 2017 sampai selesai. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : EDISON LEDI BULANG.
No Mhs : 13520043.
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pengelolaan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta)
Tempat : Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DIY
Dosen Pembimbing : Ir. Muhammad Barori, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Kemudian atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 01 Maret 2017
Ketua

Habib Muhsin, S.Sos., M.Si.

NIY. 170 230 189



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0910 / S1 / 2017

Menunjuk Surat : Dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY Nornor : 074/2102/Kesbangpol/2017
Tanggal : 02 Maret 2017 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Mengingat :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : **EDISON LEDI BULANG**
P. T / Alamat : **STPMD APMD YOGYAKARTA
JL.TIMOHO 317 YOGYAKARTA 55225**
NIP/NIM/No: KTP : **5312122009940001**
Nomor Telp./HP : **082300183915**
Tema/Judul Kegiatan : **PENGELOLAAN POTENSI DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI DESA SRIGADING**
Lokasi : **Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, DIY**
Waktu : **02 Maret 2017 s/d 30 April 2017**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 02 Maret 2017

A.n Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian
Penelitian dan Pengembangan u b
Kasubid Penelitian dan
Pengembangan
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
HENY ENDRAWATI, SP.MP
NIP. 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Bantul (sebagai laporan)
- Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Camat Sanden
- Lurah Desa Srigading, Kec. Sanden
- Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
- Yang Bersangkutan (Pemohon)